

## Abstrak

### **E-KTP UNTUK DISABILITAS TUNA GRAHITA DITINJAU DARI MAQÂŞID ASY-SYARI'AH (Studi Terhadap Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018)**

Oleh: Imam Abdul Rahman  
NIM: 15913117

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan e-KTP bagi Tuna Grahita di tinjau dari *maqâşid asy-syari'ah* (Studi terhadap pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018) untuk mengetahui implikasi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Atas Perubahan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 terhadap hak penyandang disabilitas tuna grahita untuk memperoleh e KTP dan Urgensi dan Signifikansi kepemilikan e KTP bagi penyandang disabilitas tunagrahita ditinjau dari *maqâşid asy-syari'ah*.

Penelitian ini yang digunakan berdasarkan pendekatan yuridis - normatif dan menggunakan *maqasid asy-syari'ah* melalui sumber data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier, serta dikumpulkan melalui metode dokumeter atau library research dan dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif sehingga melalui metode tersebut dapat diketahui analisis yuridis dari *maqashid syariah* kepemilikan e ktp bagi tuna grahita studi terhadap pasal 66 peraturan presiden no 96 tahun 2018

Hasil penelitian menunjukkan implikasi pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 bahwa dengan keterbatasan kondisi mental yang dimiliki tunagrahita maka dalam hal proses pembuatan KTP elektronik, kalangan tunagrahita harus dibantu oleh pihak lain dalam hal ini adalah aparatur desa setempat/aparatur Disdukcapil kabupaten atau kota/petugas UPT Disdukcapil Kecamatan setempat. Dapat pula kalangan tunagrahita tersebut dibantu oleh keluarga dekatnya atau orang lain yang dapat dipercaya dan dapat bertindak secara bertanggungjawab. Kepemilikan KTP elektronik bagi tunagrahita adalah salah satu bentuk cara yang dilakukan dalam rangka melindungi mereka sebagai warga negara. upaya pemerintah lewat regulasi dan kebijakan lain untuk mempermudah akses bagi kelompok tunagrahita dalam rangka mendapatkan KTP elektronik adalah sudah sejalan dengan tujuan keberadaan pemerintah dalam pandangan Islam. Untuk konteks layanan KTP elektronik bagi tunagrahita maka layanan inklusif yang lebih bersifat jemput bola dengan mendatangi mereka ke tempat tinggal mereka. Regulasi dan kebijakan layanan kependudukan terhadap tunagrahita harus menjadi program prioritas dan arusutama dengan berdasar pada paradigma “melayani”, “memfasilitasi”, dan “mempermudah”.

Kata Kunci: e-KTP, Tunagrahita, *maqâşid asy-syari'ah*.

## Abstract

### **E-KTP FOR PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITY AS VIEWED FROM MAQÂŞID ASY-SYARI'AH (Study of Article 66 of Presidential Regulation Number 96 of 2018)**

**Imam Abdul Rahman  
NIM : 15913117**

This study aims to describe the e-KTP (electronic-identity card / e-IC) for people with intellectual disability as seen from Maqasid asy-shari'ah (Study of article 66 of Presidential Regulation Number 96 of 2018) to determine the implications of Presidential Regulation Number 96 of 2018 about the Requirements and Procedures for Population Registration and Registration Civil Amendment to Presidential Regulation No. 25/2008 on the rights of persons with intellectual disabilities to obtain e-KTPs and the Urgency and Significance of e-KTP ownership for persons with intellectual disabilities in terms of maqashid al-Syari'ah.

This research used the juridical-normative approach and maqasid asy-syari'ah through secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal sources. The data were collected through the methodology of a documentary or library research and analyzed through descriptive-qualitative method to study the juridical analysis of maqashid syariah on the E-KTP ownership for people with intellectual disability regarding article 66 of Presidential Regulation no 96 of 2018

The results of the study showed the implications of article 66 of Presidential Regulation No. 96 of 2018 that, considering the limited mental condition of people with intellectual disability, in the case, in the process of making of electronic ID cards, the disabled people must be assisted by other parties (local village apparatus or district or city apparatus/officers at Department of Population and Civil Registration). The people with intellectual disability can also be assisted by their relatives or other people who can be trusted and responsible. The ownership of E-IC for people with intellectual disability is one of the ways to protect their benefits as citizens and the servants of Allah. The government measures through regulations and other policies to facilitate access for the people with intellectual disability in obtaining electronic ID cards have been in line with the objectives of the government in Islamic view. For the electronic ID card services for people with intellectual disability, the inclusive services tended to be more active by visiting the people with intellectual disability as the example of the development of proactive and innovative maqâşid. The regulation and policy on the population service fir the people with intellectual disability must be a priority and mainstream program in this case on the basis of the paradigm of "serving" and "facilitating".

**Keywords:** E-KTP, people with intellectual disability, maqashid al-Syari'ah

Januari 07, 2020

TRANSLATOR STATEMENT  
The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255